



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*

*

*

**

**

*

*

*

JAKARTA 2023



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
13-17 DESEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Reses ke Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Pertanian, serta Bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum dari Kunjungan ini mengacu pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Juli 2023.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 21 Agustus 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta

stakeholder di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Dr. Anggia Erma Rini, MKM., diikuti oleh para anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 13-17 Desember 2023 dan bertempat di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

1. Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros.
2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan (BPTP Sulsel), Makassar.
3. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Makasar.

II. GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia yakni tepatnya di $0^{\circ}12'$ - 8° Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'$ - $122^{\circ}36'$ Bujur Timur yang memiliki luas wilayah $46.717,48 \text{ km}^2$ dengan masing-masing luasan wilayah kabupaten/kota yang dapat dilihat pada Tabel di bawah. Tentunya dilihat secara ekonomis Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki keunggulan komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, disamping itu Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Di daratan, provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Sulawesi Tenggara di timur. Kontur daratan dari utara ke selatan membentang rangkaian pegunungan yang dipisahkan oleh Danau Tempe di pertengahan. Puncak tertinggi di Sulawesi, Gunung Rantekombola, menjulang di bagian utara-tengah provinsi. Terdapat juga beberapa aliran sungai seperti Walanae, Sadang, Kobo, Kalaena, Koladu, dan Kongkong.

Di perairan, provinsi ini dibatasi oleh Laut Flores di selatan, Teluk Bone di timur, sedangkan sebelah barat dibatasi oleh Selat Makassar yang merupakan pintu masuk utama massa air dari Samudera Pasifik yang lebih dikenal dengan Arus Lintas Indonesia (Indonesia Through Flow). Arus ini memiliki beberapa potensi, salah satu yang masih diteliti adalah kemungkinannya sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi iklim global.

**Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota
Di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2019**

Wilayah	Luas Area (km ²)		
	2014	2015	2019
Kepulauan Selayar	90350.00	904.00	1357.03
Bulukumba	1154.67	1155.00	1284.63
Bantaeng	395.83	396.00	395.83
Jeneponto	903.35	903.00	706.52
Takalar	566.51	567.00	566.61

Wilayah	Luas Area (km ²)		
	2014	2015	2019
Gowa	1883.32	1883.00	1883.32
Sinjai	819.96	820.00	798.96
Maros	1619.12	1619.00	1619.12
Pangkajene dan Kepulauan	1112.29	1112.00	1132.08
Barru	1174.71	1175.00	1174.71
Bone	4559.00	4559.00	4559.00
Soppeng	1359.44	1359.00	1557.00
Wajo	2506.20	2506.00	2504.06
Sindereng Rappang	1883.25	1883.00	1883.23
Pinrang	1961.17	1961.00	1961.67
Enrekang	1786.01	1786.00	1784.93
Luwu	3000.25	3000.00	3343.97
Tana Toraja	2054.30	2054.00	1990.22
Luwu Utara	7502.68	7503.00	7502.58
Luwu Timur	6944.88	6945.00	6944.88
Toraja Utara	1151.47	1151.00	1215.55
Makassar	175.77	176.00	199.26
Parepare	99.33	99.00	99.33
Palopo	247.52	248.00	252.99
Sulawesi Selatan	127708.35	45765.00	46717.48

Selain memiliki keunggulan dari letak geografis tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki keunggulan lain dilihat dari sisi etnik budaya, dimana masyarakat Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai etnik budaya memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global.

Populasi penduduk Sulawesi Selatan tahun 2023 diproyesikan meningkat sebesar 100 ribu jiwa dari tahun 2022 menjadi sebesar 9,36 juta jiwa, yang mana dalam setiap 1 kilometer persegi rata-rata dihuni sebanyak 199 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan jumlahnya lebih banyak dari pada laki-laki dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 98,73 persen yang berarti dari setiap 100

penduduk perempuan di Sulawesi Selatan terdapat 99 penduduk laki-laki. Secara nasional, populasi penduduk Sulawesi Selatan tahun 2023 menyumbang 3,36 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Kepulauan Selayar menjadi wilayah dengan jumlah populasi paling rendah sebesar 141,18 ribu jiwa serta dengan tingkat kepadatan sebesar 122 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur yang masing-masing sebesar 45 dan 46 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Sulawesi selatan pada tahun 2023 bertambah sebanyak 102,22 ribu jiwa, berasal dari 51,57 ribu jiwa penduduk laki-laki dan penduduk Perempuan bertambah sebesar 50,65 ribu jiwa.

Jumlah Penduduk usia produktif masih mendominasi dengan persentase sebesar 69,02 persen atau sebanyak 6,46 juta jiwa bertambah sejumlah 44 ribu jiwa dibandingkan tahun 2022. Penduduk usia tersebut adalah mereka yang lahir pada tahun 2008-1959, termasuk kategori generasi Z, milenial, generasi X, dan Generasi Baby Boomer. Dengan komposisi tersebut, rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan tahun 2023 menjadi sebesar 44,88 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 44-6 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Sulawesi Selatan juga menyimpan banyak potensi sumber daya alamnya, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan lainnya yang tercatat sebagai penyumbang terbesar bagi produksi nasional bahkan dikenal dunia karena diekspor ke berbagai negara. Kondisi geografis Sulawesi Selatan memudahkan akses dan sarana transportasi melalui darat, laut dan udara, dengan lokasi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar sebagai gerbang transportasi wilayah lain. Pengembangan ekonomi berbasis kelautan menjadi fokus utama kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Posisi Sulawesi Selatan akan memperkuat tol laut untuk konektivitas dan logistik maritim. Hal ini mencakup revitalisasi dan pembangunan armada baru kapal nasional untuk angkutan barang dan penumpang, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Pembangunan pros maritim harus diimbangi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir ALKI, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah pesisir dan laut yang terletak di ALKI II (Selat Lombok-Selat Makassar).

Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan

Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi sekitar 22,10 persen dari seluruh sektor ekonomi di tahun 2022. PDRB lapangan usaha pertanian mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,29 persen. Berbanding lurus dengan kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian juga mendominasi dengan persentase sebesar 36,74 persen pada periode Februari 2023. Diikuti sektor perdagangan 17,47 persen dan industri pengolahan 8,30 persen.

Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2022 sebesar 1,04 juta hektar, mengalami kenaikan sebanyak 0,5 ribu hektar atau 5 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 0,99 juta hektar. Pada 2022 puncak panen terjadi pada bulan September dan April, yaitu mencapai 0,17 juta hektar dan 0,20 juta hektar.

Untuk produksi daging, sapi menjadi jenis ternak dengan produksi daging tertinggi sebesar 16.277,51 ribu kg. Produksi daging unggas untuk ayam kampung 5.590.896 kg; ayam petelur 5.273.261 kg; ayam pedaging 132.352.982 kg; dan itik 1.023.475 kg. Sedangkan untuk produksi perikanan di provinsi Sulawesi Selatan didominasi dari perikanan tangkap. Dimana pada tahun 2021 mencapai 417.705 ton atau setara Rp. 12.176.757.000. Perikanan menjadi salah satu daya tarik masyarakat di Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan besaran kontribusi subsektor perikanan terhadap sektor pertanian pada perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2022 yang sebesar 64,97 persen.

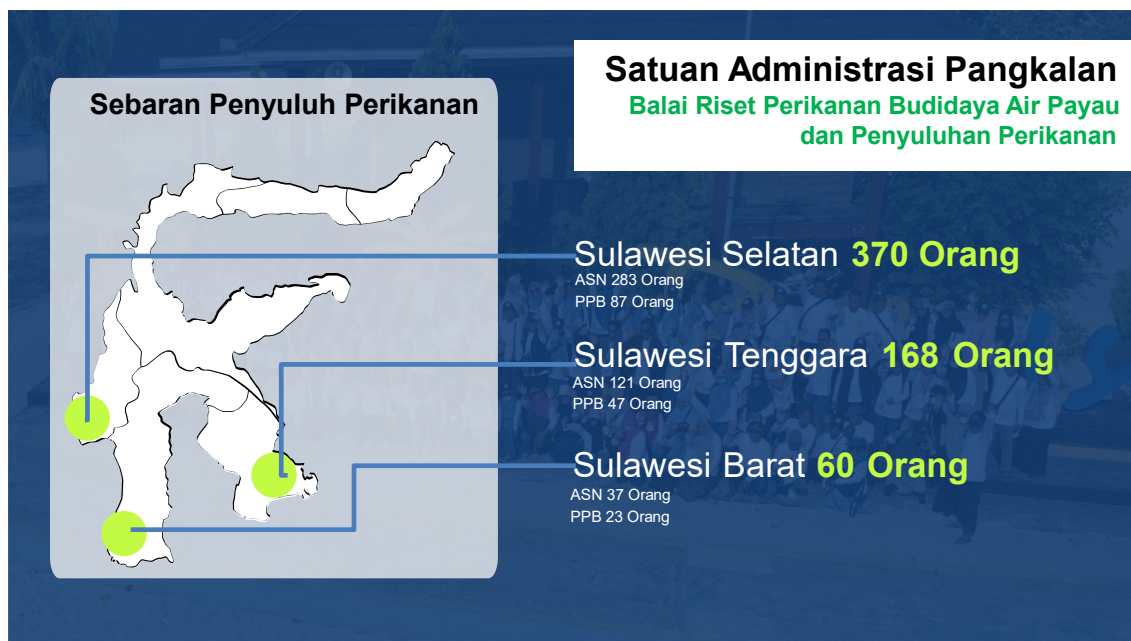
Sementara untuk hasil perkebunan pada tahun 2022 di Sulawesi Selatan ialah kelapa sawit 96,75 ribu ton; kelapa 73,99 ribu ton; karet 3,83 ribu ton; kopi 30,01 ribu ton; kakao 89,24 ribu ton; dan tembakau 1,12 ribu ton. Nilai ekspor komoditi pertanian tahun 2022 Sulawesi Selatan tertinggi adalah komoditi rumput laut dan ganggang lainnya sebesar 263,58 juta US\$. Diikuti ikan dan udang sebesar 173,70 juta US\$ dan lak, getah, dan damar sebesar 137,76 juta US\$. Dari sisi volume, ekspor ikan dan udang sebesar 19,66 ton, rumput laut dan ganggang sebesar 142,00 ton, kakao sebesar 16,00 ton, kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar 3,34 ton, buahbuahan sebesar 2,51 ton, kayu barang dari kayu sebesar 23,87 ton, dan lak getah damar sebesar 13,34 ton.

III. HASIL KUNJUNGAN

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paparan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros (BRPBAP3) memiliki lahan seluas 29,12 ha dengan beberapa prasarana diantaranya; Laboratorium Air, Laboratorium Tanah, Laboratorium Nutrisi, Laboratorium Bioteknologi, Laboratorium Patologi, Kantor, Perpustakaan, Sarana Olahraga, Mushalla, dan Instalasi Mina Padi. Sejak tahun 2023 atau paska terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BRPBAP3 harus melakukan perubahan nomenklatur menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Maros. Sumber Daya Manusia BRPBAP3 sebelumnya berjumlah 630 pegawai yang terdiri dari peneliti dan penyuluh perikanan, saat ini berkurang menjadi 598 orang dikarenakan 32 peneliti telah berpindah ke BRIN.



Penyuluh perikanan BRPBAP3 Maros memiliki tugas untuk mengcover 3 wilayah kerja diantaranya: Sulawesi Selatan 370 orang, Sulawesi Tenggara 168 orang, dan Sulawesi Barat sebanyak 60 orang.

BRPBAP3 Maros mengelola beberapa aset diantaranya:

1. Smart Fisheris Village – Mina Padi Maros
2. Instalasi Tambak Silvofishery Marana
3. Instalasi Tambak Takalar
4. Instalasi Pembenihan Barru

Tanggapan Anggota DPR RI

1. Kita tidak bisa hanya menggantungkan sumber daya ikan di alam sehingga inovasi-inovasi perikanan budidaya harus didorong untuk lebih berkembang.
2. Wilayah kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros sangat luas, sehingga perlu adanya perubahan/kenaikan level jabatan.
3. Bantuan pupuk perikanan harus segera di urus oleh KKP mengingat banyak petambak ikan yang sangat membutuhkan dan mengharapkan keberadaannya.
4. Bantuan pakan mandiri cukup bagus namun harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.
5. Perlu adanya kajian dan revisi mengenai aturan ukuran penangkapan kepiting yang diperbolehkan.
6. Alat tangkap destruktif harus di tertibkan karena sangat meresahkan dan menimbulkan konflik nelayan.
7. Mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus melakukan pendampingan dan pembinaan bagi para pelaku pembudi daya.
8. Investasi udang vaname terlalu mahal bagi masyarakat kecil, sehingga bisnis udang vaname hanya dapat dijalankan oleh orang-orang tertentu.
9. Komisi IV DPR RI Mendorong agar Balai Budi Daya Air Payau Maros dimanfaatkan secara maksimal sehingga budi daya sektor perikanan berkembang lebih baik.
10. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengembangkan budi daya air payau di daerah-daerah lain seperti yang ada di Balai Budi Daya Air Payau Maros.
11. Komisi IV DPR RI mendorong KKP agar segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam mengingat dalam undang-undang tersebut belum mengatur mengenai pupuk subsidi bagi nelayan, pembudi daya ikan.

BIDANG PERTANIAN

Paparan Kementerian Pertanian

1. Pemerintah akan terus berusaha memastikan ketersediaan benih pada saat masa tanam.
2. Masih terdapat kendala sehingga ketersediaan benih dipasaran masih belum memenuhi kebutuhan.
3. Standarisasi nasional instrumen pertanian sudah ada tetapi masih belum maksimal dalam penerapannya.
4. Berharap kepada Komisi IV DPR RI, dapat mengawal peran tugas dan fungsi penerapan standarisasi dibidang pertanian sehingga terwujud produk-produk pertanian yang terstandar dan berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan ekspor, terutama dari produk-produk lokal Indonesia.
5. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian banyak bekerja dihilir.
6. Kedepan benih harus diberlakukan standarisasi.
7. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian secara nasional belum sepenuhnya siap mengingat fasilitas dan daya dukungnya belum terpenuhi.
8. Belum ada standarisasi bagi produk impor dari luar negeri sehingga produk pertanian luar negeri yang masuk ke indonesia belum terlalu ketat seperti negara china dan lainnya.

Tanggapan BAPANAS

1. Untuk memenuhi kekurangan jagung, pemerintah telah melakukan impor jagung sebanyak 250.000 ton.
2. Bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah diklaim mampu menurunkan harga beras di pasaran.
3. Badan Pangan Nasional sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait stabilisasi ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan
4. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai BULOG jumlahnya sangat aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
5. Ketersediaan beras akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton

Tanggapan Bulog

1. Kendala Bulog dalam melakukan penyerapan gabah petani adalah tingginya harga di tingkat petani sehingga bulog tidak bisa optimal dalam melakukan penyerapan gabah milik petani.
2. Total Realisasi Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2023 adalah 999.001 Ton, terdiri dari: CBP : 606.340 Ton dan komersial : 392.661 Ton
3. Rincian Rekap Penerimaan Impor Beras Tahun 2023 Sebanyak 3,8 Juta Ton
4. Ketersediaan dan Sebaran Stok Beras Nasional adalah sebagai berikut:



Per tanggal 08 Desember 2023 total stok beras bulog sebanyak 1.473.234 ton dengan rincian sebagai berikut:

- a. CBP di gudang sebesar: 785.299 Ton
- b. CBP dalam perjalanan sebesar 594.180 Ton
- c. Komersial sebesar 93.74 Ton

Tanggapan Petani

1. Dikalangan petani masih terjadi kelangkaan pupuk sehingga sering menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk
2. Petani mengeluhkan masih minimnya subsidi pupuk

Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI

1. Komisi IV DPR RI sangat menyayangkan mengenai anggaran Kementerian Pertanian yang terus menurun dari tahun ketahun.

2. Meminta Kementerian Pertanian agar merealisasikan hasil keputusan raker khususnya pada program-program dan kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menaikkan subsidi pupuk dalam rangka mendukung produktivitas dan produksi petani.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk dan selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap data petani penerima pupuk subsidi, serta dilakukan perbaikan tata kelola pupuk subsidi
5. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan bibit unggul bagi petani utamanya pada saat menjelang masa tanam.
6. Komisi IV DPR RI memintah Perum Bulog untuk melakukan penyerapan gabah dan jagung petani.
7. Kementerian Pertanian perlu melakukan inventarisasi dan pemetaan lahan-lahan yang produktif dan kurang produktif untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dibuat sehingga bisa tepat sasaran.
8. BSIP perlu menjembatani antara petani dengan pelaku pasar/industri sehingga produk yang dihasilkan oleh petani sesuai kebutuhan dan permintaan pasar.
9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerinah agar melakukan penerapan standarisasi instrumen pertanian secara menyeluruh.
10. Komisi IV DPR RI melihat potensi sorgum sebagai alternatif pangan yang dapat menggantikan gandum. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi terkait alternatif pangan sorgum agar bibit sorgom dapat didistribusikan dan masyarakat diajak menanam sorgum terutama pada daerah-daerah yang kondisinya cocok untuk ditanami sorgum.

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

1. Gambaran Umum BBKSDA Sulawesi Selatan
Wilayah Kerja BBKSDA Sulawesi Selatan terdiri dari 3 Kota dan 21 Kabupaten di Sulawesi Selatan dan 6 Kabupaten di Sulawesi Barat dengan luas kawasan hutan kurang lebih 3.818.171 ha

2. Kawasan Konservasi

BBKSDA Sulawesi Selatan mengelola 15 Kawasan Konservasi dengan luas kurang lebih 385.939,58 ha terdiri dari:

- a. 3 Cagar Alam (91.117.80 ha)
- b. 8 Taman Wisata Alam (97.500.19 ha)
- c. 1 Taman Buru (4.152.50 ha)
- d. 1 Suaka Margasatwa (2.970.00 ha)
- e. 1 Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (988,92 ha)
- f. 1 Taman Nasional (189.208.17 ha)

3. Sumber Daya Manusia

BBKSDA Sulawesi Selatan memiliki total sumber daya manusia sebanyak 173 orang, terdiri dari:

- a. 9 struktural
- b. 12 Penyuluh Kehutanan
- c. 3 arsiparis
- d. 47 Polhut
- e. 1 PSM
- f. 4 Pranata Keuangan
- g. 25 PEH
- h. 4 PBJ
- i. 24 Pelaksana

4. Perdagangan dan Kepemilikan Satwa Liar Secara Ilegal di Wilayah Sulawesi Selatan

- a. 2018 = 179 ekor (reptil, Mamalia, Aves)
- b. 2019 = 28 ekor (Aves, Primata, Mamalia)
- c. 2020 = 1392 ekor (Reptil dan Aves)
- d. 2021 = 76 ekor (Aves)
- e. 2022 = 545 ekor dan 2053 bagian penyu (Aves, Opstean Kulit Penyu dan tanduk rusa)
- f. 2023 = 668 ekor dan 146 kg daging rusa (Aves, Reptil dan Mamalia)

5. Rute/Jalur Pintu Masuk Perdagangan TSL Ilegal di Wilayah Sulawesi Selatan

- a. Udara
Bandara Udara Sultan Hasanuddin
- b. Laut

- Pelabuhan Paotere Makasar
- Pelabuhan Soekrano Hatta Makasar
- Pelabuhan Cappa Ujung, Pare Pare
- Pelabuhan Bajoe, Bone
- Pelabuhan Belang-Belang, Mamuju

c. Darat

- Pedagang Satwa (Pasar Hobi Makasar, Pasar Bawakaraeng Makasar, Pedagang Burung di Sidarap)
- Kepemilikan Satwa Secara Ilegal secara Perorangan (Dominan di Makasar)

6. Modus Penyelundupan

- a. Satwa dijadikan opsetan
- b. Dimasukan ke dalam tas/travel bag
- c. Dimasukan ke dalam box
- d. Dimasukan ke dalam botol/wadah kecil
- e. Dikirim melalui jasa pengiriman/kargo
- f. Barang dari bagian satwa yang sudah jadi/sudah diolah
- g. Barang satwa yang dijadikan souvenir/hiasan
- h. Dimasukan ke dalam kardus
- i. Bahan mentah belum diolah

7. Data Patroli Peredaran Satwa Liar Tahun 2023

Jenis dan Jumlah Satwa Sitaan

- a. Kapas Tembak 11
- b. Cucak Hijau 20
- c. Cucak Biru 1
- d. Jalak Kerbau 3

8. Data Satwa Serahan Tahun 2023

- a. Aves 601 ekor
- b. Reptil 62 ekor
- c. Mamalia 5 ekor dan 146 daging rusa

9. Translokasi Satwa Liar Tahun 2023 (Jenis dan Jumlah Satwa Liar)

- a. Kasturi kepala hitam = 15 ekor
- b. Kakatua koki = 1
- c. Kasuari = 2

- d. Nuri Maluku = 34
- e. Perkici pelangi = 3
- f. Kasturi temate = 1
- g. Nuri telinga = 28
- h. Kakatua putih = 1
- i. Kura-kura baning = 22

10. Lokasi Tujuan dan Jumlah Translokasi

- a. BKSDA Maluku = 67
- b. BBKSDA Papua Barat = 18
- c. BKSDA Palu = 22

11. Persentase Satwa Liar yang dilepasliarkan

- a. Aves 433 ekor
- b. Reptil 42 ekor
- c. Mamalia 2 ekor

12. Tantangan Pengelolaan Konservasi

- a. Penggunaan kawasan non prosedural (bangunan dan sarana publik)
- b. Pencemaran ekosistem perairan kawasan konservasi
- c. Ketergantungan sumber mata pencaharian (livelihood) dalam kawasan hutan
- d. Konflik tenurial
- e. Bencana alam (longsor, banjir, erosi)
- f. Perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar
- g. Konflik satwa dengan manusia
- h. Invasif spesies
- i. Wisata alam masal dan sampah aktivitas wisata alam

13. Pendanaan

- a. Permasalahan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar
- b. Perdagangan satwa liar secara global meningkat 5-7% pertahun
- c. Penyelundupan terjadinya melalui pelabuhan tidak resmi
- d. Permasalahan sistem pengawasan masih manual diperlukan sistem online yang terintegrasi
- e. Personil Polisi hutan semakin sedikit

14. Upaya yang dilakukan

- a. Patroli dan penjagaan di titik rawan

- b. Sosialisasi perlindungan
- c. Koordinasi antar stakeholder terkait
- d. Penyitaan TSL ilegal baik dengan pembinaan maupun proses hukum

Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga Sumber Daya Alam dengan baik.
2. Komisi IV DPR RI mendorong perlunya penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat agar ada efek jera terhadap pelaku perdagangan tumbuhan dan satwa liar
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami permasalahan terkait perdagangan satwa liar.
4. Komisi IV DPR RI mendorong agar pemerintah untuk menyediakan area yang dapat dijadikan lokasi bagi burung Malio untuk bertelur.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera mengalokasikan pupuk subsidi bagi pembudi daya ikan kecil tradisional yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan masih membutuhkan pupuk subsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan kajian dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sehingga pupuk subsidi perikanan masuk kedalam komponen yang dapat disubsidi dan memiliki acuan hukum yang kuat.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menaikkan anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros serta menaikkan level jabatannya, mengingat wilayah kerjanya cukup luas dan beban kerjanya cukup berat.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mensosialisasikan pangan alternatif seperti sorgum yang potensinya cukup besar dan dapat menjadi solusi/pengganti atas ketergantungan gandum impor.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melaksanakan hasil keputusan Raker utamanya pada program/kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menaikkan subsidi pupuk dalam rangka mendukung produktivitas dan produksi petani.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap data petani penerima pupuk subsidi serta perbaikan tata kelola dan distribusi pupuk subsidi.
7. Komisi IV DPR RI mendorong perlunya penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat kepada pelaku perdagangan tumbuhan dan satwa liar agar terjadi efek jera.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami permasalahan terkait perdagangan satwa liar.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Sulawesi Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2023

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Anggia Erma Rini, MKM

A-41

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

A. Bidang Kelautan dan Perikanan



Peninjauan Fasilitas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros dan Diskusi mengenai Pengembangan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan

B. Bidang Pertanian





Diskusi Bidang Pertanian mengenai Persiapan Masa Tanam, Ketersediaan Pupuk, dan Ketersediaan Bahan Pangan Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan

C. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Diskusi mengenai Penanganan dan Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Antar Pulau di Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BBKSDA Sulawesi Selatan

LIPUTAN MEDIA

- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48119/t/Komisi%20IV%20Dorong%20Revisi%20UU%20Perlindungan%20Nelayan%20Agar%20Mendapat%20Pupuk%20Subsidi>
- <https://sulsel.bsip.pertanian.go.id/berita/kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-di-bsip-sulawesi-selatan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48120/t/Azikin+Solthan%3A+Sorgum+Alternatif+Pangan+Pengganti+Beras>
- <https://badanpangan.go.id/blog/post/kunjungan-kerja-bersama-komisi-iv-dpr-ri-di-sulawesi-selatan-nfa-pastikan-ketersediaan-dan-stabilisasi-pangan-saat-nataru-aman>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48117/t/Endang%20Thohari:%20Perlu%20Penambahan%20Anggaran%20untuk%20Pengaplikasian%20Hasil%20Inovasi%20Teknologi%20Penelitian>
- <https://gardaanimalia.com/perdagangan-satwa-liar-di-sulawesi-selatan-masih-marak/>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48118/t/Marak%20Fenomena%20Melihat%20Satwa%20Liar,%20Komisi%20IV%20Nilai%20Perlu%20Adanya%20Kebijakan%20Hukum%20Tegas>